LAPORAN AKHIR

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019





BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan bimbinganNya, Laporan Akhir Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan ringkasan hasil semua kegiatan Balai yang telah dilakukan selama satu tahun dan merupakan pertanggung jawaban dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi BPTP Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2019.

Terimakasih disampaikan kepada seluruh Staf BPTP Sumatera Selatan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan mandat, tugas, dan fungsi Balai selama Tahun 2019. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Palembang, Desember 2019 Kepala Balai

Dr. Atekan, SP.,M.Si NIP. 19721006 1993 1 001

DAFTAR ISI

				Halaman
KATA	PEN	NGANTAI	R	. іі
DAFT	AR I	SI		. iii
DAFT	AR T	TABEL		. v
DAFT	AR (GAMBAR		vii
I.	PEN	IDAHULU	JAN	
	1.1	Latar B	elakang	1
			Visi dan Misi BPTP Sumatera Selatan	
	1.3	Struktu	r Organisasi	. 3
	1.4	Sarana	dan Prasarana	. 4
	1.5	Sumber	Daya Manusia	5
II.	HAS	SIL KEGI	ATAN	
	2.1	Sub Bag	gian Tata Usaha	10
			Pendidikan dan Latihan	
		2.1.2.	Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan	12
		2.1.3.	Keuangan	14
			Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat	16
		215	UAPPA/B-W	
	2.2		Sistem Pengendalian Intern/Wilayah Bebas Korupsi	
	2.2		erjasama dan Pelayanan Pengkajian	379.70
			Kerjasama	
			Pengelolaan PerpustakaanPengelolaan Website	
			Pengelolaan Laboratorium	
		2.2.5.	물건이 하게 두 마다워진 아이에 가는 것이 없는 아이를 하게 되었다. 것 하게 되는 것 이번에 가장 하지만 하지만 하지만 하지만 하게 하게 하게 하게 하게 하게 하게 하게 하게 하다 하게 하다.	
		2.2.6.	나보고 있다. 프랑스레이트 아이들은 전 11일 12일에 하다고 보고 있다면 하는데 하다 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 이번에 하는데	
		2.2.7.	PPID	171
			Laboratorium Diseminasi	7.5
	2.3		TIAN DAN PENGKAJIAN SERTA DISEMINASI	
			Kajian Sistem Usaha Tani Integrasi Sapi, Jagung, dan Karet	10
			Di Sumsel	. 49
		2.3.2.		
			Pengembangan Kedelai pada Lahan Kering Masam	
		2.3.3.	Tagrimart	
		2.3.4.	Publikasi Inovasi Pertanian	
			Sosialisasi, Temu Informasi dan Pameran	
			Taman Agroinovasi	
			Pendampingan Kawasan Tanaman Padi Sumsel 2019	56
		2.3.8.	Pendampingan dan Pengembangan Tanaman Jagung	58
		2.3.9.		58
			KRPL	
		2.3.11.	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura	62
		2.3.12	Pendampingan Pengembangan Kawasan Peternakan Kerbau	63
			Di Sumsel	03

	2.3.13. Kegiatan UPSUS	64
	2.3.14. Kegiatan UPSUS SIWAB	66
	2.3.15. Pengembangan Model Pembibitan Inti Ayam KUB	67
	2.3.16. Pengembangan Model Plasma Ayam KUB	69
	2.3.17. Pengembangan Ayam KUB Berbasis Rumah Tangga	70
	2.3.18. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	72
	2.3.19. Model Pertanian Bio Industri Berbasis Tanaman pangan di Lahan Pasang Surut	73
	2.3.20. Model Pertanian Bio Industri Berbasis Tanaman Palawija di Lahan Kering	74
	2.3.21. Produksi Padi (FS 2 Ton ; SS 10 Ton)	75
	2.3.22. Produksi Benih Jagung (SS 3 Ton)	76
	2.3.23. Taman Teknologi Pertanian (TTP) Muba	77
	2.3.24. Taman Teknologi Pertanian (TTP) OKU	79
	2.3.25. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	80
	2.3.26. Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk Peningkatan	
	Indeks Pertanaman	83
	2.3.27. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Daerah	84
	2.3.28. Sinkronisasi Materi Hasil Litkaji dan Programa Penyuluhan	
	Pusat dan Daerah	86
	2.3.29. Temu Teknis Inovasi Pertanian	86
	2.3.30. Peningkatan Kapasitas Penyuluh BPTP Sumsel	88
	2.3.31. Kaji Terap	89
	2.3.32. Dukungan Perbenihan Komoditas Padi Program Strategis Kementan (ES 36;40 Ton)	90
	2.3.33.Dukungan Perbenihan Komoditas Jagung Program Strategis Kementan (F1, ES; 10 Ton)	92
	2.3.34.Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan Mendukung Sasaran Produksi Komoditas Strategis Perkebunan	93
	2.3.35. Dukungan Perbenihan Komoditas Pisang	94
	2.3.36. Monitoring Evaluasi (Monev)	95
III.	PENUTUP	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
1.	Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BPTP Sumatera Selatan tahun 2019	4
2.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang per Desember 2019	6
3.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Pendidikan Akhir per Desember 2019	6
4.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Kelompok Umur per Desember 2019	6
5.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir per Desember 2019	7
6.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional per Desember 2019	7
7.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Peneliti	7
8.	per Desember 2019 Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Penyuluh	8
9.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Pustakawan per	8
10.	Desember 2019	8
11.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang per Desember 2019	8
12.	Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan akhir dan Jenis Kelamin per Desember 2019	9
13.	Pegawai BPTP Sum-Sel yang sedang mengikuti Pendidikan	10
14.	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia	10
16.	Capaian Kinerja Indikator Pengelolaan BMN	13
17.	Kegiatan Penyelesaian Hibah dan Penghapusan Belanja 526	13
18.	Realisasi Penggunaan Dana dari DIPA BPTP Sumsel tahun 2019	15
19.	Realisasi Penggunaan Kegiatan yang di Danai SMARTD Tahun 2019	15
20.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019	16
	Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan I Tahun 2019	22
22.	Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan II Tahun 2019	22

23. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendais Hasil Pelaksanaan	23
Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan III Tahun 2019	
24. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendais Hasil Pelaksanaan	24
Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan IV Tahun 2019	
25. Program Kerja Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern BPTP Sumsel	25
(Satlak PI BPTP Sumsel) Tahun 2019	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.	Struktur Organisasi BPTP Sumatera Selatan	3
2.	Kerjasama Penelitian	27
3.	Pengelolaan Perpustakaan	28
4.	Pengelolaan Website	44
5.	Pengelolaan Laboratorium	45
6.	Pengelolaan KP Kayu Agung	46
7.	Pengelolaan KP Karang Agung	47
8.	Pengelolaan PPID	48
9.	Pengelolaan Laboratorium Diseminasi	49
10.	Kajian Sistem Usaha Tani	51
11.	Kajian Pengembangan Kedelai Pada lahan Kering Masam	52
12.	Tagrimart	54
13.	Publikasi	54
14.	Sosialisasi, Temu Informasi dan Pameran	55
15.	Taman Agroinvasi	56
16.	Pendampingan Kawasan Tanaman Padi	57
17.	Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	58
18.	Kebun Bibit Induk	59
19.	KRPL	62
20.	Kegiatan Pendampingan Hortikultura	63
21.	Pendampingan Pengembangan Kawasan Kerbau	64
22.	Pendampingan UPSUS	66
23.	Pendampingan UPSUS SIWAB	67
24.	Pengembangan Model dan Pembibitan Ayam KUB	69
25.	Pengembangan Plasma Ayam KUB	70
26.	Pengembangan Ayam KUB Berbasis Rumah Tangga	72
27.	Kegiatan Rekomendasi Kebijakan	73
28.	Pengembangan Model Pertanian Bio Industri Berbasis Tanaman Pangan	74
29.	Pengembangan Model Pertanian Bio Industri Berbasis Tanaman Palawija	75
30.	Kegiatan Produksi Padi (FS 2 Ton; SS 10 Ton)	76

31.	Kegiatan Produksi Benih Jagung	//
32.	Kegiatan Taman Teknologi Pertanian Muba	79
33.	Kegiatan Taman Teknologi Pertanian OKU	80
34.	Kegiatan Sumber Daya Genetik	82
35.	Kegiatan Indeks Pertanaman	83
36.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Daerah	85
37.	Kegiatan Sinkronisasi	86
38.	Kegiatan Temu Teknis	87
39.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	88
40.	Kegiatan Kaji Terap	90
41.	Kegiatan Dukungan Perbenihan Padi	91
42.	Kegiatan Dukungan Perbenihan Komoditas Jagung	92
43.	Kegiatan Dukungan Pebenihan Tanaman Perkebunan	93
44.	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hortikultura	94
45.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	96

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 yang ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (BPTP Sumsel) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Organisasi Balai Pengajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

BPTP Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Salah satu fungsi BPTP Sumatera Selatan yaitu pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan. Urusan kepegawaian adalah pelayanan kepada seluruh pegawai mulai dari kenaikan pangkat dan gaji, mutasi, usulan tunjangan kinerja, surat BPJS, usulan latihan dan tugas belajar, pengusulan angka kredit dan surat fungsional lainnya. Urusan rumah tangga dan perlengkapan adalah pelayanan peminjaman kendaraan roda empat dan roda dua, sarana teknis, pemeliharaan gedung kantor, halaman dan pemeliharaan instalasi pengkajian hingga dokumentasi kegiatan. Urusan keuangan adalah melaksanakan pelayanan terkait panjar kegiatan, penyelesaian administrasi keuangan dan surat tugas perjalanan dinas. Fungsi-fungsi tersebut di atas dalam tata kerja dan struktur organisasi BPTP Sumatera Selatanl menjadi tanggungjawab Kepala Subbagian Tata Usaha.

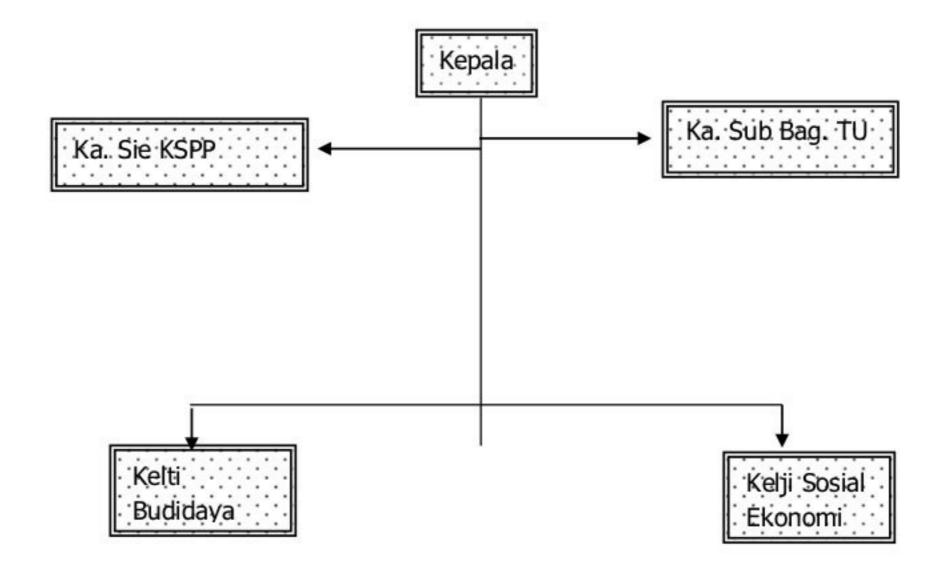
Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai secara berkala dalam bentuk laporan akhir tahun yang berisi informasi kegiatan selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari – Desember 2019 atas kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan.

II. PROFIL BPTP SUMSEL

A. Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang baru Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian bahwa struktur organisasi BPTP Sumatera Selatan terdiri atas: Kepala, Subbagian Tata Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Akhir RKTM Ketata Usahaan Tahun 2019 BPTP Sumatera Selatan ini disusun untuk menginformasikan implementasi pelaksanaan kegiatan Ketata Usahaan dan Keuangan BPTP dan Perlengkapan Sumatera Selatan selama Tahun 2019. Laporan ini tentunya dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan lain yang sejenis agar lebih baik lagi di masa mendatang.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sumatera Selatan

B. Tugas dan Fungsi

Tugas BPTP Sumatera Selatan melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTP Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- 4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

C. Tujuan dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019

Tujuan adalah mencapai optimalisasi penyelenggaraan dan penatausahaan perkantoran untuk mendukung peningkatan kinerja BPTP Sumatera Selatan dalam percepatan pengkajian dan diseminasi maka perlu adanya rencana kegiatan tingkat manajemen, yang meliputi aspek manajemen dan layanan perkantoran melalui kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu, administrasi perkantoran dan pembinaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kearsipan, pelaporan SAI, peningkatan kapasitas pegawai, kinerja dan diseminasi, sistem pengendalian intern, layanan perkantoran meliputi pembayaran gaji/lembur/vakasi pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, kebutuhan sehari-hari pegawai.

Keluaran kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai berikut :

Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

- Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Perlengkapan, Kearsipan, Pelaporan SAI
- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pegawai
- Terselenggaranya Layanan Perkantoran
- Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Gedung Perkantoran

Adapun sasaran kegiatan Subbagian Tata Usaha BPTP Sumatera Seatanl pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran kegiatan Tahun 2019

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
1	Melaksanakan manajemen	Terkelolanya satker	Pemeliharaan
	pengelolaan satker	BPTP Sumsel	mutu manajemen
		dengan standar	satker
		mutu ISO	Administrasi
		9001:2015	perkantoran dan
			Administrasi
			Kepegawaian
			Pengelolaan
			Perlengkapan,
			Kearsipan dan
			Sistem Akuntasi
			Instansi
			Peningkatan
			Kapasitas SDM
			Peningkatan
			Kapasitas Kinerja
			dan diseminasi
2	Melaksanakan Sekretariat	Terlaksana	UAPPAB/W
	kegiatan UAPPA/B-W	workshop	
		penyusunan laporan	
		keuangan semester	
		II Tahun 2018	

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
3	Melaksanakan layanan	Terlaksananya	Pembayaran gaji
	perkantoran	pembayaran gaji	dan tunjangan
		dan tunjangan bagi	
		68 ASN	
4	Melaksanakanpenyelengga	Terpeliharanya	Kebutuhan sehari-
	raan operasional dan	operasional dan	hari
	pemeliharaan perkantoran	sarana dan	Langganan Daya
		prasarana	dan Jasa
			Pemeliharaan
			perkantoran
			Pembayaran
			terkait
			pelaksanaan

III. PROSEDUR PELAKSANAAN

Kegiatan Sub Tata Usaha yang berlangsung selama 12 bulan (Januari-Desember) yang meliputi sebagai berikut :

- Layanan Manajemen Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
 - a. Pemeliharaan Mutu Manajemen Satker
 - b. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pengelolaa Perlengkapan, Kearsiapan dan Sistem Akuntansi Instansi
 - d. UAPPA/B-W
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM
- II. Layanan Perkantoran
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - c. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - d. Pemeliharaan Perkantoran
 - e. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Perkantoran

III.UAPPA/B-W

- 1. Penyusunan Laporan Semester II tahun 2018
- 2. Penyusunan Laporan Triwulan III Tahun 2019

Tahapan kegiatan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- A. Pemeliharaan mutu manajemen satker
 - a. Melaksanakan Tinjauan Umum Manajemen
 - b. Melaksanakan Audit Internal
 - c. Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015
 - d. Melaksanakan Perbaikan Audit
 - e. Mengendalikan Dokumen dan Rekaman

B. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian

- 1. Administrasi Perkantoran
 - a. Menyusun SK Organisasi dan Pengelola Anggaran
 - b. Melaksanakan Penyusunan Surat Keputusan Kegiatan
 - c. Menyusun atau Memperbaharui SOP
 - d. Melaksanakan BKU dan Buku-buku Pembantu
 - e. Melaksanakan Penutupan KAS
 - Mengajukan SPP dan SPM
 - g. Melaksanakan UP, TU dan GU dan menerima SP2D
 - Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN
 - Menatausahakan Surat Menyurat

2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

- a. Konsultasi Kegiatan Terkait Kenaikan Pangkat
- b. Mensosialisasikan Peraturan-peraturan Kepegawaian
- c. Memberikan Pelayanan Urusan Kepegawaian
- d. Melakukan Pembinaan Jasmani dan Rohani
- e. Menyampaikan Usulan Berkas Administrasi Kepegawaian
- f. Melaksanakan Regrouping dan Menyusun Peta Jabatan
- g. Menyusun Daftar Nominatif Pemangku Jabatan
- h. Menyusun dan Menyediakan Bahan Penilaian Prestasi Pekerjaan berupa Sasaran Kerja Pegawai
- Menyusun Nominatif Tunjangan Kinerja dan Perubahannya
- Mendokumentasikan Kegiatan

- Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan SAI.
 - a. Menyusun pengelola anggaran perlengkapan, kearsipan dan SAI
 - b. Melaksanakan entri data SAS, LPJ
 - Melakukan e- Rekon dengan KPPN dan KPKNL
 - d. Membuat daftar kearsipan, perbaikan daftar barang ruangan
 - e. Menyusun dan membuat laporan SAI secara berkala

4. Peningkatan Kapasitas SDM

- a. Identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan magang yang dilakukan oleh tim SDM, selanjutnya dibuat matriks kebutuhan dilakukan oleh analis kepegawaian
- b. Mengusulkan kepada kepala Balai untuk nama-nama nominatif
- Mengirimkan usulan calon peserta ke lembaga pendidikan/pelatihan/ magang
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pelatihan/ magang
- e. Mendokumentasikan kegiatan
- Layanan Perkantoran
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor, berupa:
 - Kebutuhan sehari-hari perkantoran
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Pemeliharaa Perkantoran
 - Pembayaran terkait Pelaksanaan Perkantoran

C. UAPPA/B-W

- Melaksanakan konsolidasi penyusunan laporan keuangan semester II
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan barang dan laporan keuangan wilayah
- 3. Melaksanakan penyelesaian satker inaktif PPHP di Sumatera Selatan

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PADA SUBBAG TATA USAHAAN

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pada sub bag Tata Usaha, maka personil yang terlibat seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan subbag Tata Usaha

0				Alokasi
No	Nama/NIP	Jabatan dalam	Uraian Tugas	Waktu
		Kegiatan		(Jam/
				minggu)
1.	Susilawati SP, M.Si	Kasubbag TU	Mengkoordinir	25
			kegiatan keuangan,	
			kepegawaian,	
			rumah tangga, BMN	
			dan pelaporan	
2.	Dra. Masrifawati	Pengadmitrasi dan	Melaksanakan	20
		Penyaji Data	kegiatan	
		Kepegawaian	Kepegawaian	
			sampai pelaporan	
3.	Nurlena, SP	Pengadmitrasi dan	Melaksanakan	20
		Penyaji Data	kegiatan	
		Kepegawaian	Kepegawaian	
			sampai pelaporan	
4.	Harjuma, AMd	Pengadministasi	Melaksanakan	20
		Keuangan/PPK	tugas pengelolaan	
			keuangan sampai	
			pelaporan	
5.	Drs. M. Syahrul	Penghimpun dan	Melaksanakan	20
		Pengolah Data/PPK	tugas pengelolaan	
			keuangan sampai	
		J.	Li.	

			pelaporan	
6.	Herman Susila, SH	Verifikator	Melaksanakan	20
		Keuangan	verifikasi keuangan	
			dan laporan SAK	
			satker	
No	Nama/NIP	Jabatan dalam	Uraian Tugas	Alokasi
		Kegiatan		Waktu
				(Jam/mgg)
7.	Harjuma, AMd	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan	20
		Rumah tangga dan	kegiatan rumah	
		Pemeliharaan	tangga dan	
		sarana/prasarana	pemeliharaan	
			sarana/prasarana	
			sampai pelaporan	
8.	Vina Septiana, Amd	Pelaksana	Melaksanakan	20
		Pengadaan barang	pengadaan sarana/	
		dan Jasa/	prasarana sampai	
		Pendamistrasi dan	pelaporan/rumah	
		Penyaji Data	tangga	
9.	Sarni, STP	Pelaksana	Melaksanakan	20
		Pengadaan barang	pengadaan sarana/	
		dan Jasa/	prasarana sampai	
		Pendamistrasi dan	pelaporan/rumah	
		Penyaji Data	tangga	
10.	Maulida Suraya, SP	Pelaksana	Melaksanakan	20
		Pengadaan barang	pengadaan sarana/	
		dan Jasa/	prasarana sampai	
		Pendamistrasi dan	pelaporan/rumah	
		Penyaji Data	tangga	
11.	Siti Khusniyati, SP	Pelaksana kegiatan	Melaksanakan	20

		Rumah tangga dan	kegiatan rumah	
		Pemeliharaan	tangga dan	
		sarana/prasarana	pemeliharaan	
			sarana/prasarana	
			sampai pelaporan	
12.	Rosidah, SE	Petugas SIMAK	Pengelola SIMAK	20
		BMN	BMN	
12.	Muhtiar Fikri, AMd	Petugas SAK	Pengelola SAK	20
No	Nama/NIP	labatan dalam	Urajan Tugan	Alokasi
INO	INAMIA/INIP	Jabatan dalam	Uraian Tugas	
		Kegiatan		Waktu (Jam/maa)
				(Jam/mgg)
13.	Erni Herawati, SE	Bendahara	Melaksanakan	20
		Pengeluaran	pengelolaan	
			keuangan satker	
14.	Lince Sitorus, SE	Bendahara	Melaksanakan	23
		Penerima	pengelolaan PNBP	
15.	Triaster Agusalim,	Pengadmitrasi	Melaksanakan	20
	SST	Keuangan	adminsitrasi	
			Keuangan dan	
			PUMK	
16.	Anita Karlina, SE	Verifikator	Melaksanakan	20
		Keuangan	adminsitrasi	
			Keuangan dan	
			PUMK	
17.	Tukiran	Pengemudi	Melaksanakan	20
			tugas pengemudi	
18.	Rijalalah	Pengemudi	Melaksanakan	20
			tugas pengemudi	
19.	Joko Usman	Caraka	Melakukan tugas	20
			Caraka	

IV. CAPAIAN KINERJA

A. Pemeliharaan Mutu Manajemen Satker

Organisasi BPTP Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2008 sejak Tahun 2010, telah perolehan sertifikat Pada Juni 2017 menerima sertifikat standar sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 untuk lingkup Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Sertifikat tersebut merupakan wujud komitmen BPTP Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan layanan terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan perolehan sertifika SNI ISO 9001;2015 sejak 2018.

Proses sertifikasi SNI ISO 9001:2008 dimulai pada bulan Juni 2017, Hasil audit Surveilan menunjukkan bahwa BPTP Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dan terdaftar dalam Skema Mutu Certification, setelah ditutupnya perbaikan atas 3 temuan Minor dan 4 Saran maka diterbitkan Sertifikat diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Mutu Certification International Ir. H. Arifin Lambaga, MSE dengan ruang lingkup Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mencakup Area Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, dan Kelompok Jabtan Fungsional (Study and Dissemination of Location-Spesifik Agriculture Technologu Covering Administration Sub-Division, Cooperation dan Study Service Section, and Study Service, and Funnction Group). dan di tahun 2019 pada bulan Juli 2019 dilakukan Audit Resertifikasi ISO 9001;2015 setelah ditutupnya perbaikan atas 3 temuan Minor dan 2 Saran maka diterbitkan Sertifikat diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI, dengan ruang lingkup Study and Dissemination of Location Specifik Agricultural Technology Management of Experimental.

Tabel 3. Capaian kinerja pemeliharaan mutu satker sebagai berikut

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Presentase Capaian
Diperolehnya sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100
ISO 9001:2015			

B. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi perkantoran sehari hari adalah pelayanan selama 12 bulan baik untuk pelayanan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia

Untuk menjalankan program dalam wujud beberapa kegiatan, BPTP Sumatera Selatan memiliki sumber daya manusia sebanyak 68 orang. Tenagatenaga ini menyebar di kantor BPTP Sumatera Selatan 54 orang, Kebun Percobaan Kayuagung di Kabupaten OKI 8 orang dan Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 6 orang.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, saat ini terdapat 2 orang yang berpendidikan strata 3; 17 orang berpendidikan strata 2 dan 23 orang berpendidikan strata 1. Pegawai yang berpendidikan Diploma (2-4) sebanyak 6 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 orang. dan yang berpendidikan Sekolah Dasar 0 orang.

Bila dilihat dari fungsinya, maka SDM yang sudah memiliki fungsional peneliti 19 orang, fungsional penyuluh 12 orang, fungsional pustakawan 1 orang, fungsional tehnisi litkayasa 1 orang dan fungsional umum 37 orang. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan dengan menyekolahkan staf ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sudah merupakan komitmen Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan tinggi. Saat ini terdapat satu orang staf peneliti yang

mengikuti pendidikan Strata 3 dan 1 orang yang mengikuti pendidikan Strata 2. Berikut rekapitulasi pegawai menurut beberapa kriteria per Desember 2019.

Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi perkantoran sehari hari adalah pelayanan selama 12 bulan baik untuk pelayanan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

2. Sumberdaya Manusia

Untuk menjalankan program dalam wujud beberapa kegiatan, BPTP Sumatera Selatan memiliki sumber daya manusia sebanyak 68 orang. Tenagatenaga ini menyebar di kantor BPTP Sumatera Selatan 54 orang, Kebun Percobaan Kayuagung di Kabupaten OKI 8 orang dan Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 6 orang.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, saat ini terdapat 2 orang yang berpendidikan strata 3; 17 orang berpendidikan strata 2 dan 29 orang berpendidikan strata 1. Pegawai yang berpendidikan Diploma (2-4) sebanyak 6 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 orang.

Bila dilihat dari fungsinya, maka SDM yang sudah memiliki fungsional peneliti 19 orang, fungsional penyuluh 12 orang, fungsional pustakawan 1 orang, fungsional tehnisi litkayasa 2 orang dan fungsional umum 34 orang. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan dengan menyekolahkan staf ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sudah merupakan komitmen Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan tinggi. Saat ini terdapat 3 (tiga) orang staf peneliti yang mengikuti pendidikan Strata 3 dan 1 (satu) orang yang mengikuti pendidikanStrata 2. Berikut rekapitulasi pegawai menurut beberapa kriteria per Desember 2019.

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang per Desember 2019

No	Golongan	Ruang	
----	----------	-------	--

		Α	В	С	D	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0	0	0
2	Golongan II	0	3	4	4	11
3	Golongan III	9	12	14	11	46
4	Golongan IV	5	2	3	1	11
	Total	14	17	21	16	68

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Pendidikan Akhir per Desember 2019

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I/c	-	-	-	-	120	120	27	=	-
2	I/d	-	-	-	-	-		-	-	8. - 8
3	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	II/b	-	-	-	-	-	2	1	-	3
5	II/c	-	-	-	-	2	1	1		4
6	II/d	-	-	-	-	2	2	-	-	4
7	III/a	-	-	4	1	-	4	-	-	9
8	III/b	-	1	7	-	1	3		-	12
9	III/c	-	4	10	-	3 - 2	· **	-	-	14
10	III/d	-	5	6	-	-	12	-	-	11
11	IV/a	2	3	-	-	-	-	-	-	5
12	IV/b	-	2	-	-	-	-	-	-	2
13	IV/c	-	1	2	-	-	-	-	-	3
14	IV/d	1.75	1	-	5	-	-	.=3		1
	Jumlah	2	17	29	1	5	12	2	-	68

Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Kelompok Umur per Desember 2019

No	Gol/	21-25	26-30	31-	36-	41-	46-	51-	56-60	Jumla
	Ruang	tahun	tahun	35	40	45	50	55	Tahun	h
				tahu	tahu	tahu	tahu	tahu		
				n	n	n	n	n		
1	1	-	-	-	: -	-	-	-	-	-
2	II	1	1	2	1		3	3	=	11
3	111	-	3	6	11	6	4	11	5	46
4	IV	-	-	-	-	-	3	2	6	11
	Jumla h	1	4	8	13	6	10	16	11	68

Tabel 7. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir per Desember 2019

NO	Gol/	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
	Ruang									
1	1	-	(A)	-	-	-	-	-	-	-
2	Ш	-	-	7	-	4	5	2	22	11
3	III	-	10	27	1	1	7	-	-	46
4	IV	2	7	2	-	-	-	-	2	11
	Jumlah	2	17	29	1	5	12	2	-	68

Tabel 8. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional per Desember 2019

No.	Nama Fungsional	Jumlah
1.	Peneliti	19

2.	Penyuluh	12
3.	Pustakawan	1
4.	Teknisi Litkayasa	2

Tabel 9. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Peneliti per Desember 2019

No.	Nama Fungsional	Jumlah
1.	Peneliti Utama	1
2.	Peneliti Madya	6
3.	Peneliti Muda	9
4.	Peneliti Pertama	3
5.	Peneliti Non Klasifikasi	-
	Jumlah	19

Tabel 10. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Penyuluh per Desember 2019

Nama Fungsional	Jumlah
Penyuluh Pertanian Utama	0
Penyuluh Pertanian Madya	2
Penyuluh Pertanian Muda	3
Penyuluh Pertanian Pertama	7
Penyuluh Terampil Penyelia	0
Penyuluh Terampil Pelaksana L	0
Penyuluh Terampil Pelaksana	0
Penyuluh Terampil Pelaksana P	0
Penyuluh Non Klasifikasi	0
	Penyuluh Pertanian Utama Penyuluh Pertanian Madya Penyuluh Pertanian Muda Penyuluh Pertanian Pertama Penyuluh Terampil Penyelia Penyuluh Terampil Pelaksana L Penyuluh Terampil Pelaksana Penyuluh Terampil Pelaksana Penyuluh Terampil Pelaksana

10.	Jumlah	12
1		

Tabel 11. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Pustakawan Per Desember 2019

No.	Nama Fungsional	Jumlah
1	Pustakawan Pertama	1
	Jumlah	1

Tabel 12. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Litkayasa Per Desember 2019

No.	Nama Fungsional	JUMLAH
1	Teknisi Litkaya Mahir	1
2	Teknisi Litkayasa Pelaksana	1
	Jumlah	2

Tabel 13. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur per Desember 2019

No	Jenis	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Jmh
INO	kelamin	Tahun	JIIII							
1	Laki-Laki	0	1	3	3	2	6	11	8	34
2	Perempu an	1	3	5	9	4	4	5	3	34
	Jumlah	1	4	8	12	6	10	16	11	68

Tabel 14. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Ruang Per Desember 2019

No	Golongan	Jenis	Kelamin	Jumlah
INO	Gololigan	Laki-Laki	Perempuan	Julillali
1	I/c	=	-	1 <u>2</u> 16
2	I/d	-	-	(=);
	Jumlah Gol. I		-	-
3	II/a	2	-	
	II/b	3	-	3
4	II/c	2	2	4
5	II/d	3	1	4
	Jumlah Gol. II	8	3	11
6	III/a	5	4	9
7	III/b	5	7	12
8	III/c	5	9	14
9	III/d	4	7	11
	Jumlah Gol. III	19	27	46
10	IV/a	3	2	5
11	IV/b	1	1	2
12	IV/c	2	1	3
13	IV/d	1	-	1
	Jumlah Gol. IV	7	4	11
	Total	34	34	68

Tabel 15. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin per Desember 2019

						Р	endi	dika	an A	\khi	ir da	an Je	enis	Kel	ami	n		
N	Golonga	S	3	S	32	5	31)4	D)3	SL	TA	SI	LT	S	D	Jumla
0	n													ı	Р			h
	/Ruang	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	151
1	GOL. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GOL. II		-	-	5.	-	-	8.75	17.0	1	3	5	-	2	856	-	- -	11
3	GOL. III	-	-	3	7	7	2	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	46
							0											
4	GOL. IV	1	1	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Jumlah	1	1	8	9	8	2	1	-	2	3	1	-	2	-	-	-	68
							1					2						

3. Pendidikan dan Latihan

Untuk meningkatkan pendidikan tenaga peneliti dan non peneliti telah dilakukan berbagai upaya melalui jalur formal dengan biaya pemerintah maupun dengan biaya sendiri. Jenjang pendidikan yang diikuti adalah S3 dan S2 dengan berbagai disiplin Ilmu seperti terlihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Pegawai BPTP Sumsel yang sedang mengikuti pendidikan

No	Nama	Program	Jurusan	Tempat	Sumber	Tahun	Tahun
INO	Ivallia	Program	Julusali	Tempat	Biaya	mulai	Selesai
1.	Agus	S3	Ilmu Tanah	UGM	Badan	2015	Belum
	Suprihatin,			Yogyakart	Litbang		Selesai
	SP, M.Sc			а			
2	drh.Aulia Evi	S3	Ilmu	IPB	Badan	2019	Belum
	Susanti,		Produksi		Litbang		Selesai
	M.Sc		dan				

			Teknologi Peternaka n				
3	Renny Utami Somantri, S.TP., M.Si	S3	Tekonolgi Industri Pertanian	IPB	Badan Litbang	2019	Belum Selesai
4	Syahri, S.P.	S2	Fitopalogi	IPB	Badan Litbang	2019	Belum Selesai

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Penanggung Jawab Kepegawaian pada tahun anggaran 2019 sejak triwulan pertama sampai pada triwulan keempat adalah sebagai berikut: 1) Kenaikan Gaji Berkala; 41 orang, 2) Kenaikan Pangkat; 7 orang.

Untuk pengoperasian Software SIM ASN tersebut pada tahun anggaran 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan demikian diharapkan dalam penampilan dan penyajian data-data kepegawaian dapat lebih akurat dan cepat seperti penampilan daftar Nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, umur, pangkat/golongan dan Eselon, penampilan kapan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, kapan pensiun dan pembebasan sementara.

B. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Urusan rumah tangga dan perlengkapan meliputi penerimaan, pencatatan, pemindahan, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara meliputi tanah, bangunan gedung kantor, halaman, auditorium, wisma tamu, gedung laboratorium, rumah jabatan, aset kebun percobaan, kendaraan dan mesin lainnya.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pemeliharaan kantor BPTP,

- 1. Perbaikan Atap Multirup Teras Garasi Mobil
- 2. Perbaikan dan Pengecatan Pintu Rollingdor Garasi
- 3. Ganti Daun Pintu dan Kusen kamar Mandi
- Perbaikan Paret didepan Garasi
- 5. Pembersihan dan Perbaikan Bak Penampungan Air
- 6. Perbaikan Engsel Pintu Ruangan
- 7. Pemassangan Gantungan Handuk/Baju
- 8. Pembuatan Lemari Gantungan Pintu Kaca Rangka Baja Ringan
- 9. Pintu Kaca Meja Dapur Rangka Baja Ringan
- Atap Alkin Rangka Baja Ringan Garasi
- Talang Air
- 12. Atap Alkin Rangka Baja Ringan Dapur

Tabel 17. Capaian kinerja indikator pengelolaan BMN seperti berikut.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Tersedianya daftar barang	1 Daftar barang	1 Daftar barang	100
Tersedianya daftar surat masuk dan keluar	2 daftar surat	2 daftar surat	100
Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100
Laporan Barang	2 Iaporan	2 Laporan	100

BPTP Sumatera Selatan pada Tahun 2019 telah menerima hasil pengadaan belanja 526 yaitu barang yang harus diserahkan kepada pemda/masyarakat sampai dengan 31 Desember 2019 telah mengupayakan melakukan proses hibah dan penghapusan BMN tersebut seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Kegiatan penyelesaian hibah dan penghapusan belanja 526

NO	Kegiatan	Dokumen	Keterangan
1	Berita Acara	BAST No.	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-849.3/PL.130/H/10/2019	Penghapusan
	BMN TTP	Tanggal 11 Oktober 2019	
	Banyuasin		
	Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel		
2	Berita Acara	BAST No:	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-849.1/PL.130/H/10/2019	Penghapusan
	BMN TTP	Tanggal 11 Oktober 2019	
	Banyuasin		
	Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel		
3	Berita Acara	BAST No.	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-392/PL.130/H/04/2019	Penghapusan
	BMN TTP Kab.	Tanggal 29 April 2019	
	Musi Banyuasin		
	Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel TA 2016		
4	Berita Acara	BAST No. B-	Sudah dilakukan
	Serah Terima	394/PL.130/H/04/2019	Penghapusan
	BMN TTP Kab.	Tanggal 29 April 2019	
	Musi Banyuasin		
	Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel TA 2017		

5	Berita Acara	BAST No.	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-323/PL.130/H/04/2019	Penghapusan
	BMN TTP Kab.	Tanggal 4 April 2019	
	Ogan Komering		
	Ulu Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel TA 2016		
6	Berita Acara	BAST No.	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-325/PL.130/H/04/2019	Penghapusan
	BMN TTP Kab.	Tanggal 4 April 2019	
	Ogan Komering		
	Ulu Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel TA 2017		
7	Berita Acara	BAST No.	Sudah dilakukan
	Serah Terima	B-327/PL.130/H/04/2019	Penghapusan
	BMN TTP Kab.	Tanggal 4 April 2019	
	Ogan Komering		
	Ulu Pengadaan		
	Satker BPTP		
	Sumsel TA 2018		

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat selama Tahun 2019 berjumlah 2.615 surat terdiri atas surat yang masuk berjumlah 688 baik dari instansi vertikal maupun instansi horisontal, dan surat keluar sejumlah 1.927kepada instansi vertikal dan instansi horisontal serta surat keterangan.

C. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengkajian perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana. Kantor BPTP Sumsel berada di atas lahan seluas 5.100 m². Di tanah ini berdiri beberapa gedung yang difungsikan untuk kegiatan administrasi dan tenaga fungsional dengan luas lantai dasar 369,36 m², gedung keuangan 178,22 m², gedung pelayanan teknis

(laboratorium, perpustakaan) dengan luas lantai dasar 470,69 m², luas garasi kendaraan bagian bawah 173,46 m² dengan bagian belakang berlantai dua, Pos Satpam 36,19 m², gudang 78,59 m², menara air 14,34 m² dan luas aula 648,65 m².

Kebun Percobaan Kayuagung dengan luas lahan 26,6 ha, status tanahnya adalah hak guna pakai. Berada di Desa Sidakersa Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan agroekosistem Lebak. Kebun ini dapat dijangkau dengan mudah dari Palembang dengan kendaraan roda empat. Berada di tepi jalan Trans Sumatera. Berdasarkan tipenya maka KP ini memiliki lahan lebak dalam 49,4%, lebak tengahan 19,4% dan lebak dangkal 31,2% dari luas lahan. Kebun ini berada pada ketinggian 31 m di atas permukaan laut. Adapun KP. Karang Agung dengan luas 20 ha, status tanahnya adalah pinjaman. Berada di Desa Sukamulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Untuk menjangkau kebun ini, setelah mengendarai kendaraan roda empat dari Palembang kurang lebih 3,5 jam, maka dilanjutkan dengan menggunakan *speed boat* selama 30 menit. Agroekosistem kebun ini pasang surut, bertipe luapan B/C yang berada pada ketinggian 29 m di atas permukaan laut.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, maka di lingkup BPTP Sumsel saat ini terdapat 8 kendaraan dinas roda empat, sedangkan fasilitas lapangan terdiri dari alat angkut bermotor roda tiga 4 unit, traktor tangan 4 unit, Transplanter 1 unit, perontok gabah 2 unit, box dryer 2 unit dan ditunjang dengan beberapa fasilitas untuk pengolahan benih.

Lebih lanjut mengenai keadaan kekayaan barang bergerak lingkup BPTP Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 19. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BPTP Sumatera Selatan tahun 2019

Kendaraan Roda Empat

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Pemakai	Posisi Kendaraan
1.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1753 RZ	Ka. Balai	BPTP
2.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1342 RZ	Ka. Balai	BPTP
3.	Toyota Kijang Innova(Solar)	BG 1073 RZ	Pool Kendaraan	BPTP
4.	Suzuki Vitara	BG 1501 LZ	Pool Kendaraan	BPTP
5.	Toyota Kijang	BG 1472 MZ	Pool Kendaraan	ВРТР
6.	Toyota Kijang	BG 1993 LZ	Pool Kendaraan	ВРТР
7.	Toyota Hilux Double Kabin	BG 9786 MZ	Pool kendaraan	ВРТР
8.	Toyota Hilux Pickup	BG 9505 MZ	Pool kendaraan	ВРТР
9.	Toyota Hilux Pickup	F 9846 MZ	Pool kendaraan	KP Kayu Agung
10.	Traktor NT 540 F		Pool kendaraan	ВРТР
11.	Traktor JD 5054		Pool kendaraan	ВРТР

Kendaraan Roda Tiga

1.	Viar	BG 6414 PZ	Umum	KP Kayuagung
2.	Viar	F 5371 A	Umum	KP Kayuagung
3.	Viar	F 5398 A	Umum	KP Kayugung
4	Viar	BG 6415 PZ	Umum	KP Karang Agung
5.	Viar	BG 2914 AAZ	Umum	BPTP

Kendaraan Roda Dua

1.	Yamaha YT 125	BG. 6292 NZ	Umum	KP. Kayu Agung
2.	Yamaha YT 125	BG. 6293 NZ	Tukiran	BPTP
3.	Yamaha YT 125	BG. 6295 NZ	Joko Usman	BPTP
4.	Yamaha YT 125	BG. 6296 NZ	Pool	BPTP
5.	Yamaha Vega ZR	BG. 2861 AAZ	Ka Balai	BPTP
6.	Yamaha Vega ZR	BG. 2862 AAZ	KSPP	BPTP
7.	Suzuki A100	BG. 5844 NZ	Suklandi	BPTP
8.	Kawasaki Klx 150	F. 3359 B	Pool	BPTP
9	Honda Vario 150cc	BG 2508 ABA	Kasubag TU	BPTP

E. Keuangan

Sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan alih teknologi spesifik lokasi, dalam melaksanakan tupoksinya BPTP Sumatera Selatan pada TA. 2019 didukung oleh sumber dana yang berasal dari APBN sebesar Rp 21.499.000.000.00,-

Anggaran BPTP Sumatera Selatan dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apabila dana tersebut dirinci menurut jenis belanjanya, maka persentase realisasi belanja pegawai sebesar 97%, belanja barang 98% dan belanja modal 99% seperti pada tabel berikut

Tabel 20. Realisasi penggunaan dana dari DIPA BPTP Sumsel Tahun 2019

No.	Jenis	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	5.450.289.000	5.309.018.331	97
2.	Belanja Barang	7.758.914.000	7.585.003.011	98
3.	Belanja Modal	2.997.387.000	2.966.791.908	99
	JUMLAH	21,499,000,000	21,230,241,975	98

Realisasi penggunaan dana dari DIPA BPTP tahun 2019 tersebut sebesar 98%.

Tabel 22. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019

Penerimaan	Jumlah (Rp)		
Fungsional			
KP. Kayu Agung	10.701500,-		
KP. Karang Agung	10.600.000,-		
Unit Pengelolaan Benih Sumber	101.445.000,-		
Unit Pengelolaan Benih Jagung	8.750.000,-		
Jumlah penerimaan fungsional	131.496.500,-		
Jumlah Penerimaan umum	4.900.000,-		
Jumlah PNBP	136.396.500,-		

Adapun anggaran dan realisasi dana pada masing-masing kegiatan (kegiatan rutin, penelitian, penunjang penelitian) yang dilaksanakan di BPTP Sumsel terlampir.

F. Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, maka diperlukan perangkat hukum yang didasarkan atas prinsip umum yang sehat, modern dan dinamis. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pemerintah telah membuat suatu program Sistem Akutansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diperbaharui untuk memonitor apakah keuangan Negara telah dijalankan secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan tujuan pengeluaran belanja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), maka diperlukan informasi yang relevan dalam bentuk laporan-laporan yang seragam untuk seluruh instansi pusat sampai ketingkat satuan unit kerja di daerah.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan adalah sebagai penanggung jawab UAKPA, yang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BPTP berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian

laporan BPTP ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran maupun barang pada BPTP Sumatera Selatan.

Untuk menunjang pelaksanaan program SAI pada Satuan Kerja dengan mempergunakan Sistem Akutansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan pada tahun 2019 telah dibentuk Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Untuk pelaksanaan operasional kegiatan tersebut BPTP Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan struktur organisasi dan telah mendapat alokasi dana melalui DIPA Nomor DIPA-018.09.2.567495/2017 tanggal 2 Desember 2016 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.206.590.000.00,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Laporan akhir kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2019 ini disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) yang dilaksanakan BPTP Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2017 maka dihasilkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akutansi Pemerintah. Secara kumulatif, realisasi anggaran pada TA 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2018, Pada TA 2019, pencairan anggaran selain belanja pegawai/gaji baru terealisasi pada bulan Februari. Perkembangan pencairan dana dari bulan April hingga Oktober terlihat membentuk garis lurus dengan gradien yang hampir sama, yang berarti pada bulan-bulan tersebut terjadi pencairan anggaran dalam jumlah yang hampir sama. Pada bulan-bulan berikutnya (Nopember dan Desember), pencairan anggaran berlangsung lebih cepat, hingga akhirnya mencapai prosentase realisasi anggaran DIPA Umum sebesar 98%. Angka ini berdasarkan pencairan anggaran melalui Surat perintah Membayar (SPM) yang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang.

Peningkatan pencairan dana pada bulan Nopember dan Desember disebabkan transaksi pembayaran belanja modal pada umumnya baru

dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut. Neraca Semester II 2019 per 31 Desember disusun berdasarkan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2019, dan adanya proses kapitalisasi SIMAK-BMN. Gambaran perkembangan neraca tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Posisi Neraca BPTP Sumsel pada Semester II/ 31 Desember 2017 seperti terbaca berikut ini:

- A. Aset Tetap sebesar Rp 439.344.459.790,- terdiri dari: 1) Tanah Rp 393.991.574.000,- 2) Peralatan dan Mesin Rp 12.378.948.313,- 3) Gedung dan Bangunan Rp 29.674.104.256,- 4) Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 14.146.965.670,- , 5) Aset Tetap Lainnya Rp 87.435.346,- dan akumulasi penyusutan senilai Rp 10.934.567.795,-
- B. Aset Lainnya sebesar 443.464.789.347,- terdiri dari : Aset lain-lain Rp 4.109.083.837,- sedangkan total akumulasi penyusutan sebesar Rp 183.698.533,-

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan telah dapat dilaksanakan/dioperasionalkan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat kendala dan hambatan.

G. Sistem Pengendalian Intern

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka diperlukan sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan perundang-undangan. SPI terhadap peraturan diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengawasan Intern (PI) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Penyusunan dan pengembangan unsur SPI berfungsi sebagai pedoman penyelenggara dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan SPI perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria, pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilaksanakan secara komprehensif.

Di dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, Kepres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 95 Tahun 2007, Perpres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 20 Tahun 2008, Permentan No. 341/Kpts/OT.140/ 9/2005, dan Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2007, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI)

harus berjalan sebagaimana yang diindikasikan dan diisaratkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel Nomor: 054/SK/PW.420/H.12.8/01/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern di BPTP Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada atau tidak ada Satlak SPI, sistem pengendalian intern harus berjalan, karena SPI ada dan melekat pada pimpinan. Keberadaan Satlak SPI hanyalah sebagai "alat", sehingga berjalan atau tidaknya Satlak SPI sangat bergantung kepada komitmen pimpinan, apakah "alat" tersebut mau digunakan atau tidak digunakan.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sedangkan keluaran yang diharapkan adalah: (1) Terwujudnya sistem pengendalian; (2) Terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif; (3) Terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Terlaksananya pengamanan aset negara; (5) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-1 tahun 2017 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi pembuatan Surat Keputusan yang diperlukan dalam memulai kegiatan tahun anggaran 2017, pembahasan proposal kegiatan, pemaparan RKTM/ROPP/RDHP serta membuat rencana kerja SPI tahun 2019. Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan rekomendasi antara lain pelaksanaan masing-masing kegiatan sesuai surat keputusan yang telah dibuat, melakukan penajaman proposal dan perbaikan RKTM/ROPP/RODHP. Dilakukan juga persiapan dan pelaksanaan audit BPK-RI, di samping itu, pemantauan yang dilakukan Satlak PI sehubungan dengan awal tahun anggaran, kami mencoba memantau terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sangat berkaitan dengan kegiatan perencanaan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumatera Selatan pada triwulan-II tahun 2019 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi persiapan audit external oleh tim survilence Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan

rekomendasi antara lain penerapan sistem mutu di internal organisasi seperti yang tercantum dalam sertifikar ISO 9001, Perbaikan sebagai bukti komitmen isi kebijakan mutu organisasi, penyusunan perencanaan pada sasaran mutu yang ditetapkan di intrnal organisasi,, dilakukan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK terkait dengan temuan BPK diantaranya perapian DBR dan DIR serta penyempurnaan asset-asset yang harus dihenti gunakan untuk dilakukan penghapusan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-III tahun 2017 ini, telah melaksanakan pengendalian inventarisasi ulang terkait DIR dan DBR pada aseet di kantor BPTP Sumsel, PT RPN, KP kayu agung, KP karang Agung. karena selain adanya perpindahan ruangan dan sebagai tindak lanjut BPK dan telah menghasilkan rekomendasi yaitu segera melakukan penataan kelengkapan dokumen di masing-masing bagian ruangan . pelaksanaan audit Itjen Pengadaan Barang dan Jasa khusus belanja 526 serta Selain itu dilakukan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK oleh Itjen Kementan TA 2017.

Melakukan persiapan penyelesaian BAST barang persediaan TTP di 3 (tiga) Kabupaten. Melakukan pendampingan dengan tim monitoring dan Evaluasi dari Puslit Balitbangtan terhadapkegiatan TTP Banyuasin dan TTP Musi Banyuasin.

Monitoring dan Evaluasi Kegiata Tim Monev dari Puslitbangtan dan telah dilakukan Monitoring dan Evalausi di kegiatan Taman Teknologi Pertanian (TTP) oleh Tim dari Balitbangtan Kementerian Pertanian. Masing-masing telah menghasilkan rekomendasi yaitu Untuk mempercepat pelaksanaan realisasi bangunan fisik pada kegiatan Taman Teknologi Pertanian yang masuk tahun pertama

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-IV tahun 2017 ini, telah Tindak lanjut LHP Itjen terkait temuan itjen belanja 526, persiapan dokumen TTP Banyuasin yang akan diserahkan ke Pemda Banyuasin, Pendampingan Tim Monen ke TTP Musi Banyuasin, Melakukan Sistem Pengendaluian Intern terhadap pembanguan dan Renovasi Gedung KP Kayu Agung dan Pembangunan Sarana dan Prasaran Perbenihan.

G. Sistem Pengendalian Intern

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas pembangunan dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka diperlukan sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan perundang-undangan. SPI terhadap peraturan diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengawasan Intern (PI) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Penyusunan dan pengembangan unsur SPI berfungsi sebagai pedoman penyelenggara dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan SPI perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria, pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilaksanakan secara komprehensif. Di dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, Kepres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 95 Tahun 2007, Perpres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 20 Tahun 2008, Permentan No. 341/Kpts/OT.140/ 9/2005, dan Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2007, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) harus berjalan sebagaimana yang diindikasikan dan diisaratkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel Nomor: 033/SK/PW.420/H.12.8/01/2017, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern di BPTP Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada atau tidak ada Satlak SPI, sistem pengendalian intern harus berjalan, karena SPI ada dan melekat pada pimpinan. Keberadaan Satlak SPI hanyalah sebagai "alat", sehingga berjalan atau tidaknya Satlak SPI sangat bergantung kepada komitmen pimpinan, apakah "alat" tersebut mau digunakan atau tidak digunakan.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong

meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sedangkan keluaran yang diharapkan adalah: (1) Terwujudnya sistem pengendalian; (2) Terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif; (3) Terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Terlaksananya pengamanan aset negara; (5) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-1 tahun 2017 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi pembuatan Surat Keputusan yang diperlukan dalam memulai kegiatan tahun anggaran 2017, pembahasan proposal kegiatan, pemaparan RKTM/ROPP/RDHP serta membuat rencana kerja SPI tahun 2019. Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan rekomendasi antara lain pelaksanaan masing-masing kegiatan sesuai surat keputusan yang telah dibuat, melakukan penajaman proposal dan perbaikan RKTM/ROPP/RODHP. Dilakukan juga persiapan dan pelaksanaan audit BPK-RI, di samping itu, pemantauan yang dilakukan Satlak PI sehubungan dengan awal tahun anggaran, kami mencoba memantau terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sangat berkaitan dengan kegiatan perencanaan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumatera Selatan pada triwulan-II tahun 2019 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi persiapan audit external oleh tim survilence Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan rekomendasi antara lain penerapan sistem mutu di internal organisasi seperti yang tercantum dalam sertifikar ISO 9001;2015, Perbaikan sebagai bukti komitmen isi kebijakan mutu organisasi, penyusunan perencanaan pada sasaran mutu yang ditetapkan di intmal organisasi,dan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK terkait dengan temuan BPK terhadap belanja modal berupa keterlambatan faktur kendaraan mobil, perjalanan dinas keg smartd, perbaikan As Build Drawing

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-III tahun 2019 ini, telah melaksanakan Pengendalian dan penyelesain BAST TTP Banyuasin, Pelaksanaan revaluasi BMN berup Asset tanah.

Melakukan penyelesaian BAST barang persediaan TTP di Kabupaten Banyuasin. Monitoring dan Evaluasi Kegiata Tim dari Balitbangtan dalam hal penyelesaian BAST Taman Teknologi Pertanian (TTP) Kabupaten Banyuasin oleh Tim dari Balitbangtan Kementerian Pertanian, dan melakukan monitoring

dan penyelesaian BAST tanah RPN antara adan Litbang dan BPTU – Sembawa kabupaten Banyuasin.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-IV tahun 2017 ini, telah Pelaksanaan Audit Kinerja kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) Melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa kegiatan Smardt pengadaan alat laboratorium

Tabel 22. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwulan I Tahun 2019

Ļ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			
	No	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	CATATAN TINDAK LANJUT
	140	Jenis Regiatan	Tilligkasari flasii	rtekomendasi	DARI KEPALA
					BPTP
	1	Pembuatan SK	Pembuatan SK	Setelah SK	Untuk di
		Struktur	berdasarkan tupoksi	dikeluarkan	laksanakan
		Organisasi BPTP	dan kompetensi	ditindaklanjuti	dengan baik
		Sumsel, SK	masing-masing	dengan	
		Organisasi Satlak	penanggung jawab	pelaksanaan	
		PI, SK Pengelola		kegiatan	
		Keuangan, SK		berdasarkan	
		Pengadaan		tugas masing-	
		Barang Jasa, SK		masing	
		Pemeriksaan		penanggung	
		Barang dan Jasa,		jawab	
		SK Pengelola			
		Asset, SK			
		penanganan			
		tindak lanjut LHP			
ं	2	Pembahasan	Pembahasan dihadiri	Proposal	Untuk
		proposal	oleh semua	kegiatan	dilaksanakan
			penanggung jawab	dipersempit,	dengan baik dan
			kegiatan	agar lebih fokus	memperbaiki
				dalam	proposal
			T.		1

			pelaksanaannya	
3	Pemaparan	Pemaparan dihadiri	Perbaikan	Untuk laksanakan
	RKTM/ROPP/	oleh semua	RKTM/ROPP/R	dan secepatnya
	RODHP	penanggung jawab	ODHP agar	melakukan
		kegiatan dan tm TPK	segera	perbaikan proposal
			dilakukan	
4	Pembuatan	Dilakukan oleh Tim	Rencana Kerja	Untuk
	Rencana Kerja	Satlak SPI	SPI perlu	dilaksanakan
	SPI tahun 2019		dukungan	pembuatan
			penuh dari	rencana kerja
			pimpinan dan	berkoordinasi
			pegawai BPTP	dengan kepala
			Sumsel	balai

Tabel 23. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwulan II Tahun 2019

				CATATAN TINDAK
No	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	LANJUT DARI
				KEPALA BPTP
1	Persiapan Audit	Mempersiapkan	Merevisi apabila	Di laksanakan
	External oleh tim	Dokumen-dokumen	terdapat	dan sege9a
	Survilence	terkait	ketidaksesuaian	dikoordinasikan
				dengan Tim
				SPI
2	Penyelesaian	Telah dilakukan	Kedepan akan	Di laksanakan
	Tindak Lanjut BPK	penyelesaian	dilakukan	dan segera
	terkait dengan	penyetoran TGR dan	perbaikan	dikoordinasikan
	temuan BPK	Perbaikan As Build	kelengkapan	dengan Tim
	terhadap belanja	Drawing serta	dokumen dan	SPI

modal	berupa	perhitungan volume	lebih efektif	53
keterlambat	an faktur	terbangunnya.	untuk	
kendaraan	mobil,		pengendalian	
perjalanan	dinas		Absensi dan	
keg	smartd,		pengadaan	
perbaikan /	As Build		barang dan jasa	
Drawing				

Tabel 24. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwulan III Tahun 2019

				CATATAN
No	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	TINDAK
INO	Jenis Regiatan	niligkasaii liasii	nekomendasi	LANJUT DARI
				KEPALA BPTP
1	Pengendalian	Tim Balitbangtan	Melakukan	Melakukan
	dan penyelesain	Tim Pengendalian	Penyelesaian BAST	Penanda
	BAST TTP	berasal dari BPTP		tanganan BAST
	Banyuasin	Sumsel		antara Kepala
		Tim dari Pemda		BPTP dan akil
		Banyuasin		Bupati
				Banyuasin
2.	Pelaksanaan • Tim Irjen		Penyelesaian	Untuk
	revaluasi BMN	Kementan	Revaluasi Tanah	melakukan
	berup Asset	Tindak KPKNL		Revaluasi tanah
	tanag • Tim BPTP			hingga terbit
		Sumsel		LHIP

Tabel 25. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwula IV Tahun
2019

No.	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	CATATAN TINDAK LANJUT DARI KEPALA BPTP
1	Pelaksanaan	Audit dilakukan	Menindak lanjuti	Untuk
	Audit Kinerja	oleh Itjen	hasil temuan dengan	dilaksanakan
	kegiatan Obor	Kementan	memberikan surat	sesuai dengan
	Pangan Lestari	Ka BPTP Agar	teguran ke penjab	hasil .,
	(OPAL)	Menegur penjab	OPAL no surat	pemeriksaan.
		kegaiatn yang	1154/PW.220/H.12.8	
		kurang cermat	/03/2020 tanggal 31	
		dalam membuat	Maret 2020, dan	
		perencanaan	melakukan	
		anggaran tahun	penyelesaian	
		2019 dan segera	pembelian tanaman	
		menyelesaikan	dan saprodi.	
		pembelian benih		
		tanaman dan		
		saprodi seluruhnya		
		pada awal bulan		
		Dsesember 2019		
2.	Melakukan	Pengendalian	Untuk mempercepat	Untuk segera
	pengendalian	dilakukan oleh Tim	pelaksanaan	melakukan
	terhadap	SPI BPTP Sumatera	pengadaan barang	percepatan
	pengadaan	Selatan, dengan	dan jasa	Pengadaan
	barang dan jasa	melakukan	6.23	barang dan
	kegiatan Smardt	pemeriksaan dan		jasa
	pengadaan alat	pengendalian.		
	laboratorium			

Tabel 26. Program Kerja Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern BPTP Sumatera Selatan (Satlak PI BPTP Sumsel) Tahun 2019

No.	Judul Kegiatan	Target Waktu	Keterangan
1	Penetapan SK Struktur Organisasi BPTP Sumsel TA. 2016	Februari	
2	Membentuk struktur organisasi Satlak Pl dengan Keputusan Kepala Balai berikut uraian tugas dan fungsinya	Maret	
3	Penyusunan RKTM	Februari	
4	Penyusunan program kerja Pl	April-Mei	
5	Penyusunan juknis PI	Juni	
6	Rapat Koordinasi Pertemuan Rutin Berkala Satlak PI	Juni-November	
7	Penyusunan/penambahan SOP	April	
8	Pengendalian Internal/Audit	Juni-Desember	
9	Monev Ex-Ante dan SPI	Mei dan November	
10	Monev On-Going dan SPI	Maret, Juni, September, Desember	
11	Monev Ex-Post dan SPI	Insidentil	
12	Penyusunan Laporan Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semester Laporan Tahunan	September- Oktober	
13	Melakukan penataan arsip yang tertib (bisa dalam hard copy, soft copy, rekaman suara digital, video, dll).	November	
14	Menyiapkan pelaksanaan audit surveillance dan resertifikasi ISO 9001:2015	Juni	

15	Penyelesaian LHP (BPK;Itjen:Lembaga	Paling lambat dua
	Pemeriksa Lainnya)	bulan setelah
		menerima LHP
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Setiap 6 bulan

PENUTUP

Atas berkat Rahmat Allah SWT sehingga dapat diselesaikan Laporan Akhir Tahun Kegiatan Subbag Tata Usaha Tahun 2017. Hasil kegiatan yang telah dicapai dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. BPTP Sumatera Selatan telah berhasil memenuhi persayaratan ISO 9001:2015
- b. Telah memiliki 1 peta jabatan dengan kekuatan pegawai sebanyak 68 orang (melalui SK Menteri Pertanian No458/Kpts/KP.010/7/2017).
- c. Telah memberikan pelayanan gaji, tunjangan dan tunjangan kinerja bagi 68 orang pegawai dan 6 orang tenaga honor sebanyak 6 orang selama 13 bulan.
- d. Jumlah petugas belajar, sebanyak 4 orang, dan 3 orang S3 dan S2 1 orang.
- e. 68 ASN telah membuat Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2019 ekinerja.
- f. Telah melaksanakan hibah dan penghapusan BMN hasil pengadaan belanja 526 Tahun 2019
- g. Telah melaksanakan layanan pemeliharaan kantor, gedung dan halaman serta mesin-mesin lain
- h. Mendokumentasikan secara baik surat masuk dan surat keluar dalam dokumen induk
- i. Serapan anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 21.230.241.975,00 atau mencapai 98,00 %
- j. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 136.396.500,00.

2.2. Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

2.2.1. Kerjasama

Salah satu fungsi dari BPTP adalah menyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.BPTP Sumsel sebagai salah satu lembaga publik yang mengkaji dan menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).Kerjasama tersebut diperlukan dalam upaya menumbuh kembangkan jaringan penelitian guna meningkatka kemampuan pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kerjasama BPTP Sumsel dalam tahun2019 ini terdiri dari kerjasama dalam dan luar negeri.

Kerjasama BPTP Balitbangtan Sumsel dalam tahun 2019 terdiri dari kerjasama dalam dan luar negeri.Kerjasama dalam negeri terdiri dari: (1) Kerjasama antara BMKG Stasiun Klimatologi Klas I Kenten Palembang dengan BPTP Sumatera Selatan, (2) Kerjasama penempatan siswa praktek kerja lapang di lokasi kantor maupun lokasi kegiatan BPTP Sumatera Selatan, (3) Kerjasama dengan media massa dan media eletronik,dan (4) Kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Kerjasama luar negeri adalah: (1) Closing Rice Yield Gaps in Asia Phase II (CORIGAP-PRO), yang merupakan bagian kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dengan International Rice Research Institute (IRRI); dan (2) Indobeef Program Palm Cow Project kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).

Pada Tahun 2019 ini, beberapa kegiatan masih perlu dilanjutkan terkait dengan masa kerjasama yang lebih dari satu tahun yaitu pada kegiatan Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi Iklim di Kabupaten OKI, dan Penempatan Siswa Praktek Kerja Lapang di kantor maupun lokasi kegiatan BPTP Sumsel.

Perkembangan kegiatan kerjasama dalam negeri yaitu terdapat bebrapakegiatan yang telah berjalan dan kegiatan yang masih dalam tahap penyusunan. Untuk kegiatan kerjasama luar negeri, kegiatan *Closing Rice Yield Gaps in AsiaPhase II* (CORIGAP – PRO)dan *Palm-Cow Project ACIAR* juga merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.

2.2.2. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan adalah salah satu unit kerja, tempat mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (Information and Communication Technology) telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu setiap institusi, termasuk perpustakaan berusaha untuk mengintegrasikan ICT guna membangun dan memberdayakan sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam era globalisasi. Perkembangan ICT ini melahirkan sebuah perpustakaan berbasis komputer. Ada automasi perpustakaan dan ada pula perpustakaan digital. Perpustakaan digital secara ekonomis lebih menguntungkan dibanding dengan perpustakaan biasa. Selain perpustakaan digital, website merupakan salah satu media informasi yang sangat penting pada saat ini. Informasi dapat diperoleh atau disampaikan dengan cepat melalui website. Sementara itu database merupakan sistem penyimpanan data sehingga data mudah dipergunakan kembali. BPTP Sumatera Selatan pada era teknologi informasi dan komunikasi saat ini ingin meningkatkan pelayanan informasi. Untuk mewujudkan keinginan ini, BPTP Sumatera selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan ini meliputi: 1). Registrasi Bahan Pustaka, 2). Pelabelan Bahan Pustaka dan 3). Pengaturan Tata Letak Bahan Pustaka.

Kegiatan tersebut mampu mengolah 105 bahan pustaka, masing2 sudah diregitrasi hingga siap baca, Melalui Pengelolaan perpustakaan, diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi dengan cepat sehingga memberikan keyamanan dan kepuasan bagi pengguna.

Gambar. 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

2.2.3. Pengelolaan Website



Tampilan Beranda Websie BPTP Balitbangtan Sumsel

Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Website

2.2.4. Pengelolaan laboratorium

Gambar 4 . Dokumentasi Pengelolaan Laboratorium

2.2.5. Pengelolaan Kebun Percobaan Kayu Agung

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan KP Kayu Agung

2.2.6. Pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan KP Karang Agung

2.2.7. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Pada tahun 2019 ini PPID Bptp Sumsel menempati ruangan yang lebih baik dari tahun sebelum nya. Selain itu, dari jumlah pemohon/permintaan informasi public tahun 2019 disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen public di BPTP balitbangtan Sumsel sudah terlaksana semakin baik. ini terlihat dari jumlah pemohon/permintaan informasi public yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian pelayanan public masih perlu ditingkatkan, terutama untuk mensosialisasikan portal ppid Sumsel kepada para

pemohon informasi public,peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasana serta dukungan pembiayaan.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel Tahun 2019 telah Berjalan cukup Baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 71 orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh, Mahasiswa dan Petani. Informasi secara lengkap umum telah diungah pada situs website BPTP Sumsel meliputi Laporan Tahunan BPTP Sumsel, Laporan Keuangan, DIPA, RAKL, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Lakip, Standar Pelayanan Publik dan Publikasi Hasil-hasil Pengkajian.

Di Dalam Pelaksanaanyna masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan dan Dokumentasi adalah belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP Bali untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan. Selain itu Permintaan informasi public yang masuk melalui PPID BPTP Balitbangtan Sumsel terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sehingga masih sangat tergantung dari kecepatan suplai data dan informasi dari unit kerja.

Kedepan akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi public ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi public.

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan PPID

2.3. Penelitian/Pengkajian dan Diseminasi

2.3.1. Kajian Paket Teknologi Budidaya Kedelai Toleran Naungan Di Sumatera Selatan

Kajian Paket Teknologi Budidaya Kedelai Toleran Naungan Di Sumatera Selatan Terlaksananya diseminasi teknologi budidaya kedelai toleran naungan kepada sebanyak 44 orang yang terdiri dari 24 orang petani dan 20 orang petugas lapang. Diseminasi teknologi dilakukan dalam bentuk pelatihan dan kunjungan lapang ke lokasi demplot budidaya kedelai toleran naungan di Desa Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Budidaya kedelai sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit belum menghasilkan bisa diterapkan petani di tingkat lapang dengan menerapkan teknologi budidaya yang tepat yang meliputi a) penggunaan varietas unggul toleran naungan seperti Dena-1, Detap-1, Devon-1; b) pengaturan jarak tanam (baris tunggal, baris ganda, zigzag), c) pemberian pupuk TSP 109,9 kg/ha; 105 kg KCl/ha, 17,5 kg Urea/ha Urea, 1000 kg/ha dolomit dan 1400 kg/ha pupuk kandang atau dengan dosis sekitar 70% dari rekomendasi setempat, d) penanaman menggunakan alat tanam ATBJ, serta e) pengelolaan OPT secara terpadu.

Paket teknologi yang dikaji mampu meberikan efisiensi usahatani yang ditunjukkan dengan R/C>1. Paket teknologi budidaya kedelai terbaik yaitu penanaman varietas Detap-1 yang ditanam dengan jarak tanam ganda, dimana dihasilkan R/C sebesar 2.26

Varietas dan jarak tanam kedelai yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Varietas Detap-1 memiliki tinggi tanaman terbaik (63,5 cm) dan dengan produktivitas tertinggi dibanding varietas lainnya (1,8 t/ha). Sementara itu, jarak tanam dalam menghasilkan pertumbuhan tertinggi yaitu jarak tanam zigzag yang menghasilkan tinggi tanaman mencapai 61.8 cm dengan jumlah buku subur sebanyak 17.8 buku. Namun demikian, produktivitas tertinggi justru dicapai pada jarak tanam ganda yaitu mencapai 1.69 t/ha.

2.3.2. Kegiatan Tagrimart

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu upaya menyediakan kebutuhan akan bahan pangan diinisiasi Kementerian Pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan

pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL) disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Beberapa faktor yang dapat mendukung keberlanjutan KRPL antara lain ketersediaan benih/bibit, penanganan pascapanen dan pengolahan hasil , dan pasar. Oleh karena itu diperlukan penumbuhan dan penguatan kelembagaan KBD, serta kelembagaan pengolahan hasil dan pemasaran (Tagrimart/Mart). Salah satu kebijakan Balitbangtan dalam diseminasi yaitu melakukan diseminasi dengan berbasis bisnis, yakni dengan melakukan penyediaan stok teknologi dan adanya insentif bagi agen yang menyampaikan hasil inovasi, maupun berupa hasil produk yang dihasilkan dari pengguna yaitu dalam satu wadah Tagrimart (Balibangtan, 2016). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membangun satu unit Tagrimart di kawasan Kebun Percobaan Kayu Agung dengan inisiasi memuat tiga fungsi yaitu fungsi display, fungsi pelayanan dan fungsi komersial. Pelaksanaannya mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2019.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai bulan Desember 2019 adalah: Melakukan display teknologi yang menampilkan Tanaman sayuran dalam bedengan maupun polybag (vertikultur) seperti: a.) Tanaman Bayam Hijau, b) Tanaman Kangkung, c) Kubis d) Mentimun, e) Tomat f) Tanaman Cabai g) Tanaman Sawi pokchoy, h). Tanaman jagung Manis, i) Tanaman bunga-bungaan Refugia yang menambah estetika sebagai penghalau hama (OPT) Organisme Penggangu Tanaman seperti: bunga Merry Gold (Tegethes), bunga kertas dan bunga matahari disekeliling halam kantor Kebun Percobaan Kayuagung. Hasil display tanaman berupa Inisisasi pembangunan wadah pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan melalui pembangunan Agrimart yang menggunakan satu ruangan kantor KP Kayuaagung telah dilaksanakan. Diperoleh dari kegiatan display Tagrimart berupa hasil panen sayuran (kangkung, sawi, bayam).

2.3.3. Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Untuk Peningkatan Indeks Pertanaman

Hasil identifikasi dan inventarisasi potensi SDA (bangunan infrastruktur air dan luas layanan pemanfaatan lahan sebesar 806 ha di tiga wilayah Kab. di Sumatera Selatan untuk peningkatan IP Kawasan Pertanianan.

Peningkatan produktivitas lahan tadah hujan pada musim tanam (MT II) melalui penerapan inovasi teknologi (VUB padi, sistem tanam jarwo, pemupukan berdasarkan PUTS, pengendalian OPT berdasarkan pemantauan, penerapan irigasi selang sesuai kebutuhan tanaman, memberikan tingkat hasil jarwo 2:1 sebesar 7100 kg gkp/ha, jarwo 4:1 sebesar 6600 kg gkp/ha dan sistem tegel (eksisting) sebesar 6100 kg gkp/ha dan B/C ratio masing-masing 2,52; 2.29; dan 2,12, sedangkan pada musim tanam (MT III/MK II) pada pola tanam tumpamg sari jagung+padi gogo dan pola tanam tumpang sari padi gogo+jagung diperoleh nilai masing-masing B/C ratio 0,13 dan 0,37. Sedangkan pola tanam tumpang sari Jagung+Kc. ijo diperoleh nilai B/C Ratio sebesar 1,02, (B/C = 1,02), dengan pendapatan sebesar Rp 20.119.000,-

Peningkatan peran Tim Gugus Katam melalui sosialisasi sekaligus verifikasi untuk "up date" data dari beberapa daerah terkait dengan luas baku lahan, pola tanam, penggunaan sarana produksi dan peramalan OPT yang indemik dari kabupaten ke propinsi dan pusat sehingga terjadi sinergi yang baik.

Gambar.35. Dokumentasi Kegiatan Indeks Pertanaman

2.3.4. Produksi Benih Sumber Padi (Fs 14 Ton)

Usaha penangkaran benih padi menjadi salah satu usaha produktif dari beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok tani. Dalam memproduksi benih padi, kelompok tani Penangkar bekerjasama dengan anggota tani, dan Balai Pengawas dan sertifikasi benih provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan teknologi PTT padi antara lain: 1) olah tanah sempurna, 2) bibit muda kurang dari 21 hari, 3) 1-3 bibit per lubang, 4) pemupukan yang berimbang, 5) pengairan basah kering dan 6) pengendalian gulma dan OPT yang optimal, dan 7) adanya kegiatan roguing oleh kelompok tani atas bimbingan BPSB dan BPTP Sumsel. Salah satu syarat benih bermutu adalah tingkat kemurnian genetic yang tinggi, oleh karena itu rouging perlu dilakukan dengan tujuan membuang rumpun-rumpun tanaman yang cirri-ciri marfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas yang diproduksi benihnya. Adapun prosedur kegiatan penangkaran VUB padi, mulai dari persemaian sampai panen dan pasca panen selalu berkoordinasi

Produksi benih sumber yang sudah diproses dan berlabel milik UPBS BPTP Sumatera Selatan sebanyak 3.460 kg, terdiri dari varietas Inpari 22 sebanyak 2210 kg dan Inpari 38 1250 kg, Semestinya produksi target sebanyak 14 ton. Tidak terpenuhi target tersebut dikarenakan adanya serangan hama wereng yang menyerang padi Inpari

33 dan Inpari 22, disajikan pada gambar 3 (Lampiran). Untuk memenuhi target tersebut kita tanam kembali di musim hujan (MH), dengan menggunakan varietas Inpari 22, Inpari 32 dan Inpari 42. Sedangkan dari produksi benih yang ada sebanyak 3.460 kg telah terdistribusi sampai dengan bulan Desember sebanyak 1380 kg, dan sisanya sebanyak 1980. Pendistribusian benih sumber padi UPBS BPTP Sumsel.

2.3.5. PRODUKSI BENIH SUMBER PADI(SS 21 TON)

Kegiatan UPBS dalam logistik benih di daerah bertujuan untuk mendiseminasikan VUB yang dihasilkan oleh BB Padi juga pada prinsipnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan benih sumber di daerah. Dengan demikian UPBS perlu berkoordinasi dengan Dinas maupun kelembagaan perbenihan setempat antara lain BPSB, BBI, BBU, Instalasi Kebun Benih, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan, penangkar dan produsen benih. Kegiatan koordinasi dapat dilakukan pada tahap persiapan untuk perencanaan produksi benih sumber sampai dengan tahap distribusi. Hal ini untuk menjamin bahwa benih yang akan dihasilkan diketahui oleh lembaga perbenihan setempat dan sesuai dengan kebutuhan maupun menampung aspirasi dari stakeholder. Oleh karena itu, informasi produksi benih yang dihasilkan harus disebar luaskan, agar stakeholder dan masyarakat dapat terinformasikan ketersediaan benih di UPBS.

Dalam hal distribusi, maka penyaluran benih dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak saja menunggu permintaan dari stakeholder, juga dapat dilakukan melalui promosi dan kegiatan lain.

Usaha penangkaran benih padi menjadi salah satu usaha produktif dari beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok tani. Dalam memproduksi benih padi, kelompok tani Penangkar bekerjasama dengan anggota tani, dan Balai Pengawas dan sertifikasi benih provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan teknologi PTT padi antara lain: 1) olah tanah sempurna, 2) bibit muda kurang dari 21 hari, 3) 1-3 bibit per lubang, 4) pemupukan yang berimbang, 5) pengairan basah kering dan 6) pengendalian gulma dan OPT yang optimal, dan 7) adanya kegiatan roguing oleh kelompok tani atas bimbingan BPSB dan BPTP Sumsel.

Salah satu syarat benih bermutu adalah tingkat kemurnian genetic yang tinggi, oleh karena itu rouging perlu dilakukan dengan tujuan membuang rumpun-rumpun tanaman yang cirri-ciri marfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas yang diproduksi benihnya.

Pertemuan kelompok dilakukan dengan anggota kelompok tani penangkar dan didampingi oleh petugas lapangan, Pertemuan kelompok penagkar dilakukan minimal satu bulan sekali oleh kelompok tani dan kadangkala dilapangan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan usahatani yang sedang atau akan dilakukan. Demikian juga dengan aktivitas penyebarluasan inovasi ini, agar inovasi yang dilakukan dapat dipercepat adopsinya.

Produksi benih sumber yang sudah diproses dan berlabel milik UPBS BPTP Sumatera Selatan sebanyak 22.030 kg, terdiri dari varietas Inpari 30 sebanyak 9.160 kg dan Inpari 43 sebanyak 9730 kg, dan Inpari 6 sebanyak 3.140, artinya sudah melebihi dari target produksi sebanyak 21 ton. Sedangkan dari produksi benih yang ada sebanyak 22.030 kg telah terdistribusi sampai dengan bulan Desember sebanyak 8.640 kg, sedangkan sisanya sebanyak 13.390 kg.

2.3.6. PRODUKSI BENIH SUMBER PADI(SS 21 TON)

Kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Perbenihan Komoditas Pisang Hasil Litbang Pertanian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 melalui pendekatan kerjasama dengan pihak luar untuk mempersiapkan diseminasi benih ke petani sebagai pengguna akhir.

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2019, yaitu produksi bibit pisang sebanyak 500 batang, pemindahan bibit ke polybag, penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan distribusi. Adapun target dan capaian produksi benih pisang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Produksi Tahun 2019

Komoditas	Target		Capaian	
	Varietas	Volume	Varietas	Volume
Dicana	1. Cavendish	350	1. Cavendish	350
Pisang	2. Raja Bulu	150	3. Raja Bulu	150
Jumlah		500		500

Tabel Pendistribusian Benih Pisang

No	Nama Kelompok	Bibit yang diterima				
		Pisang Raja Bulu	Pisang Cavendish	Jumlah Batang	Penerima	Tanggal
1	UPTD TPH Buay Runjung OKUS	40	60	100	Yulius Ediyanto	9 Sept 2019
2	KWT Seruni	-	50	50	Lestari	15 Sept
3	Kelompok Mulia Sejahtera Bersama	20	30	50	Susiana	15 Sept 2019
4	PAUD Bustanul Amin	-	100	100	Dian Yunita	17 Sept 2019
5	KWT Ketimun	20	20	40	Rita Dewi	3 Okt 2019
6	KWT Borang Indah	20	20	40	Sri Harjiani	3 Okt 2019
7	Kelompok Mekar Sari	-	20	20	Sri Muryani	3 Okt 2019
8	Sekolah Alam Kayu Agung	50	50	100	Prahesti, Spd	3 Des 2019
	JUMLAH	150	350	500		

Kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Perbenihan Komoditas Pisang sudah terlaksana dengan menghasilkan 500 benih pisang, yaitu varietas cavendish 350 batang dan varietas Raja Bulu 150, dan sudah terdisribusi dengan baik.

2.3.7. Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura Di Sumatera Selatan

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggul yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pengusahaan budidaya bawang merah telah menyebar di hampir semua provinsi Indonesia. Meskipun minat petani terhadap bawang merah cukup kuat, namun dalam

proses pengusahaannya masih ditemui berbagai kendala, baik kendala yang bersifat teknis maupun ekonomis. Untuk keberhasilan budidaya bawang merah selain menggunakan varietas unggul, perlu dipenuhi persyaratan tumbuhnya yang pokok dan teknik budidaya yang baik.

Bawang merah merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput, berbatang pendek dan berakar serabut. Daunnya panjang serta berongga seperti pipa. Pangkal daunnya dapat berubah fungsi seperti menjadi umbi lapis. Oleh karena itu, bawang merah disebut umbi lapis. Tanaman bawang merah mempunyai aroma yang spesifik yang marangsang keluarnya air mata karena kandungan minyak eteris alliin. Batangnya berbentuk cakram dan di cakram inilah tumbuh tunas dan akar serabut. Bunga bawang merah berbentuk bongkol pada ujung tangkai panjang yang berlubang di dalamnya. Bawang merah berbunga sempurna dengan ukuran buah yang kecil berbentuk kubah dengan tiga ruangan dan tidak berdaging. Tiap ruangan terdapat dua biji9 yang agak lunak dan tidak tahan terhadap sinar matahari (Sunarjono, 2004).

Tanaman bawang merah ini dapat ditanam dan tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dpl. Walaupun demikian, untuk pertumbuhan optimal adalah pada ketinggian 0-450 meter dpl. Komoditas sayuran ini umumnya peka terhadap keadaan iklim yang buruk seperti curah hujan yang tinggi serta keadaan cuaca yang berkabut. Tanaman bawang merah membutuhkan penyinaran cahaya matahari yang maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25°-32°C serta kelembaban nisbi yang rendah (Sutaya et al, 1995).

2.3.8. UPSUS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan serapan gabah petani (SERGAP) di wilayah Sumatera Selatan terutama yang dikawal oleh Babinsa, dilakukanlah pelatihan mengenai Manajemen Pascapanen untuk Memperbaiki Kualitas Gabah dan Beras. Pelatihan yang diselenggarakan selama satu hari (30 Januari 2019) ini dilaksanakan atas kerjasama antara BPTP Balitbangtan Sumsel, Bulog Divre Sumsel dan Kodam II Sriwijaya.

Pelatihan diikuti oleh sebanyak 25 orang Babinsa yang berasal dari beberapa wilayah Komando Distrik Militer (KODIM) sentra beras yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, dan OKI. Sebagai narasumber pada pelatihan yakni Budi Raharjo, STP, M.Si. berasal dari BPTP Sumatera Selatan yang menyampaikan materi mengenai Penanganan Pascapanen

Padi dan Ibu Yuni dari Jastama Bulog yang menyampaikan materi mengenai Tata Cara Pemeriksanaan Gabah Beras serta praktik penentuan kualitas beras yang dipandu oleh Tim Jastama Bulog.

Kegiatan diawali dengan arahan dari Kepala Bulog Divre Sumsel yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan, Ibu Ninik, yang menyampaikan mengenai target SERGAP wilayah Sumsel serta kriteria mutu gabah maupun beras yang bisa diserap oleh Bulog. Menurutnya, tahun 2019 ini Bulog Divre Sumsel-Babel ditargetkan dapat menyerap sebanyak 70.571 ton setara beras, dimana sebanyak 56.514 ton setara beras ditargetkan bisa diserap pada periode Januari-Maret 2019. Selanjutnya, demi keamanan stok yang disimpan sebagai cadangan, gabah atau beras yang akan diserahkan ke Bulog diharuskan memiliki mutu sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2015. Untuk gabah GKG, syarat mutu yang harus dimiliki yakni KA 14%, persentase hampa/kotoran 3%, sedangkan beras harus memiliki kriteria KA 14%, derajat sosoh 95%, butir patah 20% dan menir 2%.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala BPTP Balitbangtan Sumsel Ir. Amirudin Pohan, M.Si. Dalam arahannya, beliau berharap agar setelah diadakannya pelatihan ini, peserta bisa memahami mengenai syarat mutu serta prosedur penanganan gabah/beras agar bisa memenuhi standar yang dipersyaratkan. Peserta selaku pendamping di tingkat lapang, dapat meminimalisir serapan gabah/beras yang masih di bawah standar, sehingga saat pengambilan sampel maupun pemilihan sampel gabah/beras di tingkat lapang dapat lebih akurat (sesuai persyaratan). Selain itu, diharapkan serapan gabah yang ditargetkan Bulog dapat terpenuhi.





Gambar Pelatihan penentuan kualitas gabah

2.3.9. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN JAGUNG DI SUMATERA SELATAN

Pendampingan dilakukan di Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU. Kabupaten OKU merupakan wilayah pendampingan kawasan pengembangan Jagung yang sudah ditetapkan pemerintah. Identifikasi lokasi pertanaman jagung untuk kegiatan Pendampingan Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung Di Sumatera Selatan beranjak dari data sekunder yang menunjukkan bahwa wilayah terluas pertanaman jagung di Kabupaten OKU berada di Kecamatan Lengkiti.

Luas tanam jagung di kecamatan ini mencapai lebih dari 2.900 ha. Sedangkan luas panen jagung di Kecamatan Lengkiti mencapai 4.727 ha. Artinya penanaman jagug di kecamatan ini sudah dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Dari 13 kecamatan yang ada, maka Kecamatan Lengikiti merupakan wilayah yang paling luas panen jagungnya di Kabupaten OKU. Sedangkan Kecamatan Sosoh Buay Rayap menduduki peringkat kedua dengan luas panen 1.861 ha.

Fajar Jaya adalah desa tempat dilakukannya pendampingan. Penetapan Desa Fajar Jaya di Kec. Lengkiti Kab OKU dengan pertimbangan petani setempat sangat berminat akan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas jagung pada musim kemarau. Luas tanam jagung di Desa Fajar Jaya lebih kurang 500 ha. Fokus pendampingan ini dilakukan di Kelompok Tani Tunas Jaya yang beranggotakan 25 orang dengan luas lahan jagung 40 ha. Diinformasikan bahwa pada musim kemarau produktivitasnya 4 t/ha, sedangkan di musim hujan lebih kurang 7 t/ha.

Di Desa Fajar Jaya jagung memberi pendapatan dominan pada sektor pertanian berkisar 30-40%, diikuti oleh kopi, karet dan padi. Pertanaman jagung tidak dilakukan secara serentak, ada yang sementara melakukan panen, terlihat juga aktivitas penjemuran yang dilakukan dan masih adanya tanaman yang menjelang panen, akibat keterbatasan tenaga kerja yang tidak dapat melakukan penanaman secara serentak.

Pada kegiatan Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi Di Wilayah Sumatera Selatan, BPTP Sumsel mengimplementasikan demfarm IP 200 dengan pola padi-jagung seluas 5 ha, dimana aktivitas budidaya jagung dilakukan pada bulan Juni-September 2013 di Desa Telang Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin menunjukkan bahwa produktivitas jagung pioneer 27 pipilan kering sebesar 5,8 t/ha, sedangkan hasil yang diperoleh dengan cara petani sebesar 4,15 t/ha. Ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dengan menerapkan inovasi teknologi. Pada demfarm

IP 200 tersebut proporsi biaya tenaga kerja pada jagung 62,76% dari biaya produksi. Baik pada cara petani maupun inovasi yang dilakukan pada demfarm, biaya tenaga kerjanya lebih besar dibanding biaya bahan dan alat (Hutapea *et al*, 2015).

Hasil kajian yang dilakukan di Desa Simbang, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros pada bulan Mei – Agustus 2012 oleh Bunyamin dan Andayani (2012) yang menunjukkan bahwa usahatani jagung hibrida pada agroekosistem lahan tadah hujan layak dan menguntungkan untuk diusahakan dan dikembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di daerah Maros Kecamatan Bantimurung. Produktivitas jagung hibrida ini masih dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Pada kajian tersebut biaya tenaga kerja pada budidaya jagung hibrida Bima-4 di lahan tadah hujan sebesar Rp 6.840.000/ha dimana biaya panen dan pasca panen Rp 3.240.000/ha merupakan biaya terbesar pada biaya tenaga kerja tersebut. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Zuraida (2010) di Kecamatan Landasan Ulin Kotamadya Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2010 pada usahatani jagung manis, biaya panen dan pasca panen merupakan biaya terbesar (Rp 1.500.000/ha) dari biaya tenaga kerja (Rp 3.600.000/ha).

Kegiatan peningkatan indeks pertanaman di lahan sawah tadah hujan Sumatera Selatan TA. 2012 dilakukan dengan mewujudkan demplot di Desa Lubuk Siberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kegiatan tersebut, hasil kajiannya menunjukkan bahwa respon dari petani kooperator dan non kooperator terhadap komponen teknologi yang diprediksi dapat diadopsi dengan baik pasca kegiatan demplot adalah pada komponen pembuatan saluran drainase, menanam secara tugal dan menggunakan jarak tanam tertentu, pemupukan, pengendalian OPT dan penyiangan 1 kali. Hal ini disebabkan dengan komponen tersebut relatif tidak mengeluarkan biaya tambahan, melainkan relatif sama dengan biaya yang dikeluarkan sebelumnya pada tenaga kerja. Sedangkan untuk pola tanam yang diprediksi dapat diadopsi dengan baik pasca kegiatan demplot adalah pada pola Kacang tanah – Padi dan Pola Jagung – Padi. Hal ini disebabkan kedua pola tanam tersebut memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi bagi petani setelah tanam padi (Thamrin, 2012).

Perluasan areal untuk pertanaman jagung terus berkembang di wilayah Kecamatan Tanjung Lago. Pada awal kegiatan " Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi" tahun 2011 dimulai dengan 15 ha lahan yang ditanam IP 200 di Desa Telangsari (5 ha diantaranya adalah demfarm) dan hanya demfarm 5 ha di Desa Muliasari. Pada MK 2014, di Desa Muliasari dan Telangsari luas tanam jagung masing-

masing sudah mencapai 615 ha dan 312 ha (Hutapea dan Waluyo, 2014). Selain di lokasi kegiatan, maka pada MK 2014 dampak kegiatan berupa ekskalasi IP 200 dengan pola padi-jagung juga terjadi di desa sekitar, seperti Desa Purwosari disebabkan adanya aktivitas pelatihan yang juga melibatkan petani dari desa tersebut, di samping adanya dukungan petugas/ instansi terkait serta adanya kunjungan yang disengaja ataupun lokasi penempatan demfarm memang mudah dilalui oleh petani dari desa sekitar.

2.3.10. Kaji Terap

Kaji terap budidaya padi rawa lebak yang dilakukan di dua desa Pemulutan Ulu, Kec.Pemulutan, Kab.Ogan Ilir se luas 4 ha dengan teknologi yang diinroduksikan VUB (Inpari 33, Inpari 34, Inpari 6 dan Situbagendit), jajar legowo 4:1 dan pupuk berimbang. Hasil produksi dari masing- masing varietas Inpari 33, Inpari 30 dan Inpari 6 dan situbagendit rata-rata 5,4 - 8,0 ton gkp/ha dengan sistem tegel sedangkan Inpari 34 dan Situbagendit yang ditanam sistem legowo 4:1 produksinya lebih tinggi untuk produksi Situbagendit 10 ton gkp/ha dan Inpari 34 yaitu 9,3 ton gkp/ha.

Untuk mempercepat adopsi inovasi kaji terap budidaya padi di rawa lebak dan budidaya jagung dilahan kering dilakukan pembinaan melalui pertemuan kelompok dan pendampingan/pembinaan langsung dilapangan oleh penyuluh pertanian lapang, dan dilengkapi dengan 2 (dua) petunjuk teknis: 1) Pemasyarakatan Teknologi Budidaya Padi Rawa berbasis Mekanisasi di lahan pasang surut; 2) Teknologi Peningkatan Produktivitas Padi dilahan Rawa Lebak. serta melakukan Temu lapang dengan memperagakan hasil dari kegiatan kaji terap yang telah dilaksanakan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan kaji terap budidaya jagung di lahan kering Varietas BISI-18 (5,3 ton pipil kering/ha) dengan kadar air 29,2% dan Provit-A (3,9 ton pipil kering/ha) dengan kadar air 28,9 % dan Pioneer 27 (3,7 ton pipil kering/ha).

Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Programa Penyuluhan Pertania Pusat dan Daerah telah di laksanakan dan menghasilkan Matrik Programa Penyuluh BPTP Badan Iitbang Pertanian Sumsel.

Dari hasil kegiatan Kaji budidaya jagung di lahan kering dan Kaji terap budidya padi rawa lebak dapat menghasilkan 3(tiga) Karya Tulis Ilmiah: 1) Perilaku petani dalam budidaya padi rawa lebak; 2) Preferensi petani terhadap VUB Jagung dilahan Keing Kabupaten Ogan Ilir; 3) Keragaan Agronomi padi Varietas Inpari di rawa lebak Desa Pemulutan Ulu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Bimtek penyuluhan menyajikan 3 (tiga) materi utama, yaitu: (1) Sosialisasi Program "Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KONSTRATANI)" dari BPTP-Balitbangtan Sumatera Selatan; (2) Kiat Menyusun Angka Kredit Penyuluhan Pertanian dan DUPAK online oleh Tim Forum Komunikasi Penyuluh Pertanian Utama (FKPPU); dan (3) Literasi Pustaka oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebarluasan Teknologi Pertanian Bogor. Peserta berjumlah 100 orang terdiri dari penyuluh BPTP Sumatera Selatan, Penyuluh Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dan Penyuluh Pertanian dari 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.11. PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PADI DI RAWA LEBAK SUMATERA SELATAN

Desa Sugiwaras Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir berbatasan dengan Desa Muara Telang di Sebelah Utara, dengan Desa Sri Guna di sebelah Timur, dengan Desa Jambu Ilir di sebelah Barat dan dengan Desa Tanjung Lubuk di Selatan. Musim hujan pada bulan Oktober-April dan musin kemarau bulan Mei-September. Curah hujan rata-rata 1500 – 2500 mm/tahun dan suhu minimum rata-rata 23 - 32°C. Para petani di desa ini telah melaksanakan pertanaman padi satu tahun dua kali yaitu pada musim kemarau bulan April-Mei dan musim penghujan bulan Oktober –Nopember. Topogafi wilayah dengan ketinggian 6 m diatas permukaan laut dan kemiringan 4 %. Jenis tanah Aluvial, PH tanah 4-5. Luas pertanaman padi sekitar 216 ha dengan 5 kelompok tani yaitu : kelompok tani Sei Baung, Sei Baung Ilir, lebak seberang, Rimbe Umang, Talang Simpur.

Penerapan teknologi budidaya padi rawa lebak di tingkat petani masih sederhana. Tetapi petani di desa ini telah menerapkan penanaman padi dua kali dalam setahun dimana pada musim kemarau bulan Mei-Juni dan musim hujan pada bulan Desember- januari berdasarkan secara alami. Permasalahan yang ada diantaranya kekeringan dan kebanjiran serta kekurangan tenaga kerja. Benih padi didapat dari perbanyakan sendiri dan petani dari Desa Tugu Mulia. Dari beberapa komponen teknologi budidaya yang didasarkan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), hanya 4 (empat) komponen teknologi yang diterapkan dengan baik oleh petani, yaitu penyemaian, persiapan lahan, olah tanah dan pengendalian gulma. Sistem persemaian yang diterapkan oleh petani adalah berupa persemaian di lahan kering dengan mengolahan lahan persemaian yang ada didekat persawahan lalu benih yang sudah direndam disebarkan. Petani sudah melakukan pengendalian gulma sebanyak 2

kali setiap musim tanamnya dengan menggunakan tangan (secara manual) dan herbisida. Sedangkan komponen teknologi lainnya masih sangat rendah penerapannya.

Sebanyak 55,55% petani telah menggunakan benih padi varietas unggul baru (VUB) dan selalu digunakan di setiap musim tanam. Sedangkan 44,45% lainnya menggunakan VUB namun tidak di setiap musim tanam. Petani belum menggunakan perlakuan benih dengan menggunakan larutan ZA atau garam 3% dengan perbandingan 1 kg ZA dilarutkan dengan 3 liter air. Jumlah benih yang digunakan oleh sebagian besar petani adalah lebih dari 50 kg/ha. Petani belum melakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan dan status hara tanah. Jenis pupuk yang dominan digunakan oleh petani adalah pupuk urea dan NPK dengan dosis berkisar antara 50 - 100 kg/ha. Pemberian pupuk ini hanya didasarkan pada pengalaman petani musim tanam sebelumnya atau sesuai dengan kondisi keuangan petani. Petani masih belum terbiasa dengan pengelolaan air secara benar agar tidak tergenang lama bila air hujan datang, tetapi tidak kekeringan bila musim kemarau, jadi masih mengandalkan secara alami. Selama ini, musim tanam dilakukan tergantung pada kondisi cuaca saja. Pada saat musim kemarau akan kekeringan dan begitu juga sebaliknya jika musim penghujan lahan akan sulit untuk ditanami. Sebagian besar petani masih melakukan penanaman dengan jarak tanam tidak teratur (66,67%), dan belum menerapkan sistem tanam jajar legowo. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara kimiawi menggunakan pestisida, belum menggunakan prinsip pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu (misalnya pergiliran varietas, penanaman tepat waktu dan serempak, menggunakan pestisida nabati). Pada saat pemanenan, petani belum menggunakan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester tetapi dilakukan secara manual dengan menggunakan arit dan alat perontok gabah manual. Pengeringan gabah dilakukan dengan cara dijemur dengan cahaya matahari. Komponen teknologi budidaya padi rawa lebak yang perlu ditingkatkan penerapannya adalah penggunaan VUB, pemupukan spesifik lokasi sesuai kebutuhan tanaman dan status hara tanah,perlakuan benih, pengelolaan air, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.

Penggunaan VUB dalam budidaya padi rawa lebak menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan produktivitas tanaman. Pemilihan VUB yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. VUB memiliki potensi hasil tinggi, toleran rendaman fase vegetative 2 minggu, toleran kekeringan , tahan hama penyakit, serta berumur genjah. Untuk dapat

berproduksi optimal, tanaman memerlukan unsur hara yang cukup selama pertumbuhannya. Karena itu, pemupukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya padi. Pemberian pupuk, baik organik maupun non organik, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, mengingat hara di dalam tanah umumnya tidak mencukupi. Pemupukan dengan efisiensi yang tinggi dapat dicapai dengan penggunaan pupuk secara berimbang. Artinya pupuk yang digunakan didasarkan kepada hara yang dibutuhkan tanaman dan yang tersedia di tanah. Uji Laboratorium atau penggunaan Perangkat Uji Tanah sawah serta Bagan Warna Daun (BWD) dapat membantu dalam menentukan pupuk spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan tanaman dan status hara di dalam tanah.

Kekeringan lahan sawah pada musim kemarau dapat diupayakan dengan membuat sumur bor atau memasukkan air dari sungai dengan membuat saluran drainase yang dibantu dengan pompa air. Padi dapat ditanam dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dan 4:1. Sistem tanam ini banyak memberikan manfaat, diantaranya: (1) semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir yang biasanya memberi hasil lebih tinggi (efek tanaman pinggir); (2) memudahkan pengendalian hama, penyakit dan gulma; (3) penggunaan pupuk lebih berdaya guna. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan mengutamakan penggunaan prinsip pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.